

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 1, 2024, Halaman 473-479
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10580723)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10580723>

Inovasi Teknologi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E-Government Studi Kasus Aplikasi Sakedap di Kabupaten Bandung

Khoerunisa¹, Amelia Najatin², Faqih Eka Muhammad Anwar³, Rahmat Santa⁴, Junjunan Maulana Yusuf⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi Bandung

email: ¹khoerunisa1009@gmail.com, ²nazatinamelia19@gmail.com, ³ekafaqih55@gmail.com,
⁴santa.ysanta@gmail.com, ⁵maulanajunjunan@gmail.com

Abstrak

Aplikasi SAKEDAP atau Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk menyelenggaraan sebuah pelayanan untuk masyarakat kabupaten bandung sendiri. Adapun sumber yang relevan dengan topik kajian yaitu mengenai Inovasi Teknologi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E- Government akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan artikel. Data yang dikumpulkan bersumber dari Google Scholar. Efektivitas Aplikasi SAKEDAP dalam Pelayanan Adminitrasi Kependudukan Jika dilihat dampak positif dari apikasi ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Selain daripada itu aplikasi ini dibuat awalnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan DISDUKCAPIL kabupaten bandung dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi SAKEDAP ini belum berjalan begitu optimal bisa dilihat dari Rating dan Ulasan aplikasi ini, disebabkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat karena adanya kendala yang dihadapi. Kendala ini disebabkan karena beberapa Masyarakat mengalami kesulitan dalam melakukan penguploadan berkas, kurangnya fitur chat, dan tidak sedikit Masyarakat yang mengeluh tentang nomor antrian yang selalu penuh.

Kata Kunci : *Inovasi, SAKEDAP, E-Government*

Abstract

The SAKEDAP application or the Integrated Population Service System carried out by the Population and Civil Registration Office of Bandung Regency to organize a service for the people of Bandung Regency itself. The sources that are relevant to the topic of study, namely regarding Public Service Technology Innovation in E-Government Implementation, will be used as references in writing the article. The data collected is sourced from Google Scholar. Effectiveness of the SAKEDAP Application in Population Administration Services If we look at the positive impact of this application, it can facilitate the community in obtaining population administration services. Apart from that, this application was initially made to prevent the spread of the Covid-19 virus in the DISDUKCAPIL environment in Bandung Regency and speed up the service process to the community. This SAKEDAP application has not run so optimally, it can be seen from the Rating and Review of this application, due to the many complaints from the community because of the obstacles faced. This obstacle is caused because some people have difficulty uploading files, lack of chat features, and not a few people complain about queue numbers that are always full.

Keywords: *Innovation, SAKEDAP, E-Government*

Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 10 Januari 2024

Accepted date: 25 Januari 2024

PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi, hal ini juga sedang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Dari 193 negara anggota, Indonesia menduduki urutan ke 88 dalam survei elektronik (PBB 2020). Ada tiga aspek utama yang digunakan untuk mengukur efektivitas e-government dalam penyediaan layanan publik, yaitu ketersediaan infrastruktur, kapasitas SDM, dan ketersediaan layanan e-government. Survei ini mengukur efektivitas e-government dalam penyediaan layanan publik. Tujuannya sebagai alat bantu untuk mengukur kemajuan yang dapat menentukan kekuatan dan kemampuan saat menghadapi tantangan dalam mengembangkan pelaksanaan sistem pemerintahan elektronik (Kominfo, 2020). Penerapan e-government saat ini telah berkembang

menjadi pemerintahan berbasis digital, atau di kenal dengan istilah digital government (Bahtiar et al., 2021). Serta penerapan e-government ini telah membawa Indonesia mengalami kemajuan dalam hal mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Konsep dari e-government juga bisa kita artikan sebagai pengguna teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintah agar lebih efisien dan efektif. Melalui e-government dapat bisa memungkinkan terjadinya sebuah interaksi dan komunikasi baru antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan lainnya, antara pemerintah di daerah dengan pemerintah yang ada dipusat, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian penerapan e-government di sector pemerintahan mempunyai peran penting untuk mewujudkan keinginan pemerintah dalam meningkatkan sebuah kualitas pelayanan administrasi public. Karena melalui pelayanan yang transparan yang bisa di akses melalui internet agar masyarakat dapat melihat persyaratan – persyaratan dalam mengurus sesuatu yang sedang diperlukan seperti contoh, mengurus SITU, SIUP, Akte kelahiran dan lainnya, berpa biaya yang dapat dikeluarkan, berapa lama proses pengerjaan, dan lain sebagainya.

E-Government juga bisa di artikan dengan pemanfaatan teknologi informasi (Internet, Telpon, Satelit) oleh institusi pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintahan melalui hubungan dengan masyarakat, komunitas bisnis, ataupun kelompok lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan agar dapat memberikan sebuah layanan public yang lebih baik, untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan sebuah bisnis industry, serta dapat meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan efisiensi management pemerintahan. Bank dunia juga menyatakan : *“Electronic government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends : better delivery of government services to citizens, improve interactions with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions.”*

Yang dikemukakan oleh Bank Dunia yaitu mengandung sebuah makna pada intinya Electronic Government merupakan penggunaan teknologi informasi yang mampu memberikan peningkatan hubungan antara pemerintah dan pihak lain. Pada pengguna informasi ini dapat menghasilkan hubungan didalam bentuk baru seperti : G2C (Government to Citizen), F2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (Government to Government atau Inter-Agency Relationship).

Pemerintahan Kabupaten Bandung telah membuat sebuah jejaring untuk sarana pelayanan public dimana sarana pelayanan ini yang dibuat pertama kali ketika sedang dilanda wabah Covid-19 yang dimana kesulitan melayani secara langsung jadi salah satu cara nya melalui aplikasi SAKEDAP yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung untuk menyelenggaraan sebuah pelayanan kepada masyarakat kabupaten bandung sendiri. Pada aplikasi ini pemerintah memberikan pelayanan beberapa jenis pelayanan yang dapat diakses di rumah, diantaranya : Pencetakan KTP-EL, Kartu Keluarga, Aktivasi dan Validasi NIK, akta kelahiran, akta kematian, pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak), Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

KAJIAN TEORI

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi merupakan sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu. Adapun ungkapan lain bahwa Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan dapat di implementasikan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas tetapi merupakan sebuah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang dimana dapat menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sector publik untuk membuat nilai bagi Masyarakat (Asian Development Bank)

Pelayanan Publik bisa diartikan sebagai pemberi pelayan (Melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah di tetapkan. Adapun Pengertian pelayanan umum dikemukakan melalui Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sedangkan kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi di antaranya Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers selanjutnya Responsibility atau tanggungjawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Electronic Government

Dalam Instruksi presiden No. 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government menjelaskan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan public secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dapat dilakukan sistem penataan management dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan menurut hasil riset dari *Harvard JFK School Of Government*, Diantaranya :

Support

Element ini merupakan bagian terpenting dalam pengembangan E-Government. Perlu dukungan atau biasa dilakukan *Political Will* dari pejabat public agar konsep E-Government dapat diterapkan. Tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat terlaksana. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

Capacity

Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang harus dimiliki, yaitu Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-government. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-government. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Value

Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government. Dalam elemen value yang menentukan besar tidaknya manfaat e-government adalah masyarakat sebagai penerima pelayanan. untuk itu, perlu ketelitian dalam memilih aplikasi yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat yang perlu didahulukan dalam pembangunan dan pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode library research atau kajian pustaka yang nantinya akan melakukan mencari materi bahan pustaka berupa artikel, jurnal, maupun buku yang berhubungan dengan topik yang akan diselidiki (Baharizqi, Muhtar, Herlambang, & Fahrozy, 2023). Adapun sumber yang relevan dengan topik kajian yaitu mengenai Inovasi Teknologi Pelayanan Publik Dalam Implementasi E- Government akan dijadikan sebagai referensi dalam penulisan artikel. Data yang dikumpulkan bersumber dari Google Scholar. Tujuan kajian pustaka ini untuk menghimpun informasi, merangkai dan menyimpulkan kembali ide-ide utama serta pandangan yang telah ada

dalam literatur terdahulu, kemudian mengintegrasikan dengan pandangan peneliti dan menghubungkannya dengan topik penelitian. Sejalan dengan pendapat Pitaloka et al., (2021), menyatakan bahwa penelitian kepustakaan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan dan konsep pemikiran yang sedang dikaji karena menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bisa menyajikan kesimpulan berupa kata-kata dan rekomendasi yang bisa diterapkan oleh pembaca.

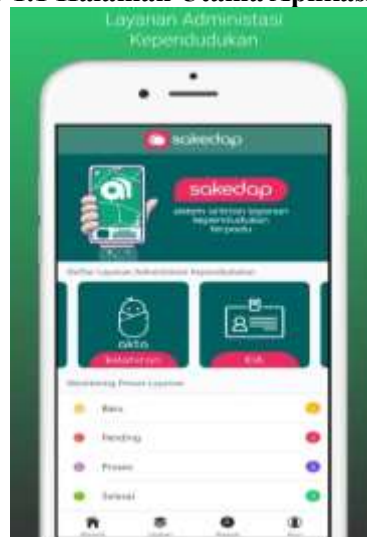
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan aplikasi SAKEDAP

Disini terdapat Data penggunaan aplikasi sakedap dalam setahun, pengguna aplikasi sakedap pada masa pandemi covid 2021. Ada beberapa Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan yang bersangkutan, studi literatur serta media audio visual. Hal ini di perkuat dengan adanya bahwa pengembangan dari sistem e-government itu menghasilkan dan membantu menyebarkan informasi serta perkuat eksistensi (Shiyo (dalam Mustafa et al, 2021)).

Dalam Proses penelitian aplikasi SAKEDAP dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung.

Gambar 1.1 Halaman Utama Aplikasi Sakedap



Sumber: google play store

Gambar 1.1 menunjukan halaman utama pada aplikasi SAKEDAP yang bisa digunakan oleh Masyarakat untuk mengajukan permohonan dokumen yang di butuhkan.

Gambar 1.2 Penggunaan Aplikasi Sakedap

NO	NAMA	JUMLAH
1	PENCETAKAN KTP-EL	34056
2	KIA (KARTU IDENTITAS ANAK)	4177
3	AKTA KELAHIRAN	5146
4	AKTA KEMATIAN	760
5	AKTA PENCERAIAN	22
6	AKTA PERKAWINAN	164
7	AKTIVASI ADM	1212
8	KK-CETAK ULANG	31701
9	KK-NUMPANG	1783
10	KK-PENAMBAHAN ANAK	2794
11	KK-PISAH	997
12	KONSOLIDASI	6628
13	PINDAH DATANG	3149
14	PINDAH KELUAR	2800

Sumber: jurnal efektivitas aplikasi sakedap dalam system pelayanan kependudukan terpadu di disdukcapil kabupaten bandung oleh dera izhar hasanah, afifah khoerunnisa 2023

Gambar 1.2 menunjukan bahwa adanya antusias dari mas

Masyarakat dalam penggunaan aplikasi SAKEDAP, permohonan dokumen yang paling banyak yaitu ada di pencetakan KTP-EL karena itu hal yang paling utama untuk Masyarakat yang harus mempunyai identitas yang salah satunya yaitu KTP-EL. Begitu pun operator aplikasi sakedap lebih mengutamakan masyarakat yang belum mempunyai KTP-EL sama sekali, bukan berarti mengabaikan kebutuhan administrasi kependudukan yang lain, karena kalau belum ada KTP-EL administrasi kependudukan yang lain tidak bisa diproses.

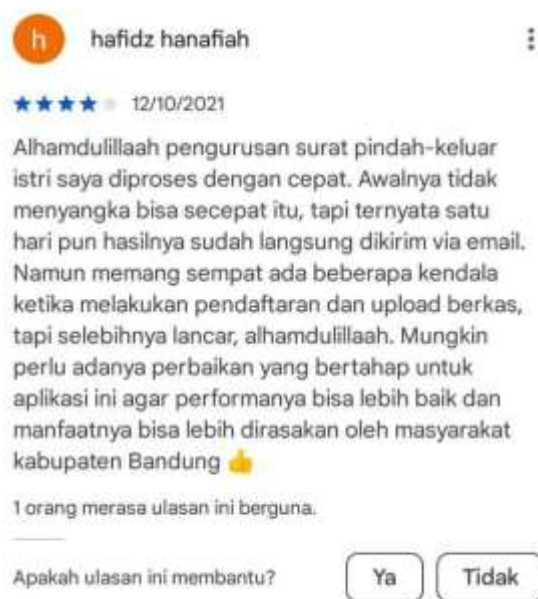
Efektivitas Aplikasi SAKEDAP dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan

Di lihat dari keefektifan aplikasi sakedap dalam pelayanan administrasi kependudukan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu aplikasi ini dibuat awalnya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari penerapan efektivitas aplikasi SAKEDAP sejauh ini bisa membantu Masyarakat dalam mengakses atau memohon pengajuan data ke kantor disdukcapil kabupaten bandung tanpa harus datang ke kantor langsung. Efektivitas aplikasi Sakedap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa indikator efektivitas penerbitan berdasarkan teori efektivitas yaitu Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi dan Perkembangan Sutrisno (2018:106).

Hal ini dapat di lihat dari ulasan Masyarakat yang menggunakan aplikasi sakedap.

Gambar 1.2 ulasan Masyarakat



Sumber : google play store, 2020

Berdasarkan gambar 1.2 tentang ulasan masyarakat dapat dilihat dari aplikasi SAKEDAP bisa membantu Masyarakat mengurus dokumen yang mereka butuhkan seperti ulasan diatas seorang masyarakat bisa mengurus surat pindah-keluar daerah menggunakan aplikasi SAKEDAP setidaknya mengurus dokumen tersebut tidak harus mengantri juga tidak harus datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL di Kabupaten Bandung maka dari itu dengan menggunakan aplikasi sakedap Masyarakat bisa mengefisienkan waktu mereka.

Upaya tertib administrasi kependudukan yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan dokumen kependudukan serta dapat mengefektifkan waktu untuk penduduk yang bertempat tinggal jauh dari kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Karena aplikasi SAKEDAP sudah terintegrasi dengan berbagai jenis inovasi pelayanan seperti Antrian Online, Dokumen Kependudukan Kami Antar (DOKKAR), dan Sistem Online Cetak Sendiri (SI OCES) (casip.bandungkab.go.id, 2021).

Hal yang menjadi pendukung efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SAKEDAP yaitu dengan adanya hukum dimana adanya anjuran dari Bupati Bandung dan surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung nomor 470/185/DISDUKCAPIL/2021 tentang penetapan standar pelayanan dilingkungan disdukcapil Kabupaten Bandung agar pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan melalui aplikasi SAKEDAP.

Kendala penggunaan Aplikasi SAKEDAP

Aplikasi SAKEDAP ini aplikasi ini belum berjalan begitu optimal bisa dilihat dari Rating dan Ulasan aplikasi ini, disebabkan karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan kendala yang dihadapi masyarakat. Kendala ini disebabkan karena sulitnya masyarakat dalam melakukan penguploadan berkas, kurangnya fitur chat, dan tidak sedikit Masyarakat yang mengeluh tentang nomor antrian yang selalu penuh, begitupun masyarakat yang datang ke DISDUKCAPIL untuk mengambil antrian akan tetapi tetap saja pegawai DISDUKCAPIL menyuruh untuk mengambil antrian di aplikasi SAKEDAP yang sekarang dalam masa perbaikan sehingga masyarakat sulit mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan.

Gambar 1.3 ulasan kendala penggunaan aplikasi



Sumber: google play store, 2021/2024

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa aplikasi sakedap belum sepenuhnya bisa melayani Masyarakat dalam pelayanan kependudukan secara online dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dirasakan Masyarakat seperti ulasan di atas. Selain itu dalam penelitian Ana (2021) terdapat ungkapan wawancara dari Pak Rahmat sebagai Camat di Kecamatan Baleenda mengungkapkan “tidak semua Masyarakat tidak semua bisa menggunakan aplikasi sakedap karena terkendala tidak adanya handphone ada yang punya kuota dan tidak semua orang mampu mengoprasikannya karena yang datang ke pelayanan itu tidak semua anak muda sehingga ada yang tidak mengerti bagaimana menggunakan aplikasi sakedap itu apalagi untuk yang lansia”. Kendala yang kami teliti aplikasi SAKEDAP tidak dapat digunakan untuk pengguna IOS karena aplikasi ini tidak terdaftar di Appstore, padahal pada zaman sekarang semakin canggihnya teknologi banyak Masyarakat pengguna IOS, akan tetapi aplikasi sakedap hanya dipergunakan untuk pengguna android.

SIMPULAN

Efektivitas aplikasi SAKEDAP sejauh ini bisa membantu Masyarakat dalam mengakses atau memohon pengajuan data ke DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Dalam tertib administrasi kependudukan karena memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan dokumen kependudukan serta dapat mengefektifkan waktu untuk penduduk yang bertempat tinggal jauh dari kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung dengan ini Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Bandung. Karena aplikasi ini sudah terintegrasi dengan berbagai jenis inovasi pelayanan seperti Antrian Online. Meskipun penerapannya masih belum optimal di samping efektivitas penggunaan aplikasi SAKEDAP ada beberapa kendala di antaranya aplikasi SAKEDAP belum sepenuhnya bisa menampung semua kebutuhan Masyarakat akan pengajuan dokumen yang mereka butuhkan dan kurangnya SDM yang bertugas mengelola

REFERENSI

- Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 230–253. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Baharizqi, S. L., Muhtar, T., Herlambang, Y. T., & Fahrozy, F. P. N. (2023). Kompetensi Pedagogik Di Era Society 5.0: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Pedagogik Kritis. Elementary School Journal PGSD FIP UNIMED, 13(2), 259-257.
- Dera Izhar Hasanah, Afifah Khoerunnisa 2023. Efektivitas Aplikasi Sakedap Dalam Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu Di Disdukcapiil Kabupaten Bandung [6.+DERA+DAN+AFIFAH \(3\).pdf](#)
- Dwiyanto, Agus, 2002, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Farhatania. 2020. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sidekem (Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Pemalang) Di Desa Kuta Kabupaten Pemalang. Diakses dari: <http://lib.unnes.ac.id/42263/1/3301416059.pdf>
- Hadiyanti. 2021. Aplikasi Sakedap (Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu). Diakses dari: <https://www.babakan-ciparay.desa.id/artikel/2021/4/19/aplikasi-sakedapsistem-pelayanan-kependudukan-terpadu>. Diakses pada 07 September 2021
- Muhammad Irsan. Rancang Bangun Aplikasi Mobile Notifikasi Berbasis Android Untuk Mendukung Kinerja Di Instansi Pemerintahan [9984-32029-1-PB.pdf](#)